



Antisipasi Bencana, Badung Siapkan Dana Tak Terduga Rp 3 M

MANGUPURA, NusaBali

Masuk musim penghujan, Pemkab Badung meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Tak hanya kesiapan personel, Pemkab juga menyiapkan anggaran tak terduga sebesar Rp 3 miliar. Anggaran ini dapat sewaktu-waktu diambil bila terjadi bencana.

Dari potensi titik rawan bencana yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badung, wilayah Badung utara seperti Kecamatan Petang dan Abiansemal tetap menempati ranking pertama dan kedua sebagai wilayah rawan bencana. Petang dengan topografi wilayah pegunungan sangat rawan terjadi tanah longsor. BPBD mengkhawatirkan perubahan musim menyebabkan tanah yang semula kering, menjadi sangat labil karena guyuran hujan. Masih di dua wilayah ini, selain ancaman longsor, angin puting beliung juga jadi ancaman serius. Sehingga masyarakat diminta waspada apalagi bila terjadi hujan lebat.

Selain Petang dan Abiansemal, ancaman tanah longsor juga bisa terjadi di wilayah Mengwi, seperti Desa Sading dan Penarungan. Pasalnya, wilayah ini dibelah oleh beberapa sungai dalam dan besar. Potensi longsor lainnya adalah di wilayah Badung Selatan seperti daerah bukit Ungasan dan Pecatu, Kuta Selatan. Hanya tidak separah di daerah Badung Utara.

Kemudian, untuk daerah rawan angin puting beliung, merata di setiap wilayah. Namun berdasarkan beberapa kasus, potensi yang paling besar adalah di wilayah Abiansemal dan Mengwi.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Badung Kompyang R Swandika, Minggu (29/11), menjelaskan, dana tak terduga ini meng-cover dana penanggulangan dan penanganan bencana milik sejumlah SKPD.

Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bina Marga dan Pengairan (BMP) hingga Dinas Sosial. Dana tak terduga ini pun sudah dipasang dalam APBD 2015 maupun 2016 (dalam RAPBD).

"Jadi kalau dana penanggulangan bencana di beberapa kurang, bisa mengambil dana tak terduga Rp 3 miliar ini," kata pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara, tersebut.

Meski begitu dana tak terduga ini hanya digunakan untuk keperluan yang sifatnya perbaikan fasilitas umum atau kebutuhan logistik selama penanggulangan pascabencana. Bagaimana kalau yang rusak rumah warga? Kompyang R Swandika menjelaskan, untuk kerusakan bencana yang merugikan warga atau bersifat gawat darurat bisa diambilkan dari dana penanggulangan bencana milik beberapa SKPD seperti BPBD maupun Dinas Sosial. Contohnya, bila berkenaan dengan kerusakan rumah bisa dibantu dari Dinas Sosial.

Bahkan, kalau masih tak cukup, lanjut Kompyang R Swandika, bisa diambilkan dari dana sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Teknisnya, pemerintah meminta persetujuan legislatif untuk penggunaan dana

hal 1



Sambungan

Silpa yang digunakan penanganan bencana. "Dana Silpa bisa juga digunakan kalau masih tidak cukup. Saya rasa dewan juga bisa maklum dan tidak akan mempersulit kalau masalah bencana," tandas mantan Kepala Bappeda Badung itu.

Yang menarik, meski dana tak terduga selalu dipasang, selama ini dana tak terduga tidak pernah habis. Dana yang ada pada setiap SKPD biasanya mampu menutupi. "Walau dana tak terduga ini tak pernah habis sama sekali, kami tetap mengantisipasi," tandasnya sembari berharap semoga tidak pernah terjadi bencana di Badung.

Kepala Pelaksana BPBD Badung I Nyoman Wijaya, belum bisa dimintai konfirmasi mengenai kesiapan mengantisipasi bencana di Badung. Meski begitu beberapa waktu lalu dia menegaskan, untuk mengantisipasi semua bencana yang kemungkinan datang, BPBD sudah bekerjasama lintas SKPD. Semua SKPD terkait dilibatkan untuk penanganan bencana, baik sebelum, saat maupun setelah terjadi bencana. **asa**

hal 2

Edisi : Senin, 30 Nov 2015

Hal : 2



Perangkat Desa Takut Cairkan Dana Desa

Anggota Komisi
IV DPRD Bali I
Ketut Mandia
menyatakan kades
di Klungkung
takut mencairkan
dana desa.
Data di BPMPD
Bali, dana desa
di Klungkung
telah 80 persen
dicairkan.

DENPASAR, NusaBali

Ribetnya aturan dan rendahnya sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintahan desa, mengakibatkan pencairan dana desa yang merupakan dana bantuan keuangan kabupaten, provinsi, dan pusat tidak semuanya lancar. Terbukti banyak dana desa masih parkir di rekening desa karena kades dan perangkat desa tak berani mencairkan.

Anggota Komisi IV DPRD Bali dari Dapil Klungkung I Ketut Mandia di Denpasar, Minggu (29/11), mendesak Pemprov Bali lebih banyak memberikan arahan dan

pelatihan supaya pencairan dana desa bisa tuntas tanpa ada ketakutan dari para kades dan perangkat desa di bawah.

"Banyak kades dan perangkat desa yang tak berani mencairkan dana desa yang sudah ada di rekening. Peruntukan dana desa banyak yang tidak paham. Selain itu, mereka takut mencairkan, karena takut salah. Kami dapat aspirasi tersebut dari para perangkat desa dan kades di lapangan. Ini artinya sosialisasi dan pembinaan itu belum mantap dan masih perlu ditambah," ujar Mandia.

Sementara Kepala BPMPD Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana yang dikonfirmasi soal paranoidnya kades dan perangkat desa menggunakan dana desa akan dicek di lapangan. "Apakah itu informasinya valid, tentu akan kami cek lagi," ujar Lihadnyana.

Kata Lihadnyana untuk di Kabupaten Klungkung, sebanyak 53 desa menerima dana mencapai Rp 15,6 miliar. Dari jumlah Rp 15,6 miliar sebanyak Rp 12,02 miliar sudah cair. "Artinya yang sudah cair mencapai 80 persen. Kalau 80 persen cair kami menilai sudah

bagus serapannya. Dan tidak ada masalah. Kalau ada laporan yang disampaikan anggota dewan akan kami cek lagi," tutur Lihadnyana.

Lihadnyana menjelaskan, kemungkinan tidak paham mekanisme dan program tersebut bukan terjadi di tingkat kades. Bisa saja di tingkat kadus (kepala dusun) atau di perangkat desa seperti kaur. "Kalau kades dan sekretaris desa di Bali kami sudah berikan pelatihan dan pengarahan. Kalau perangkat lain memang belum," ucap birokrat asal Kecamatan Busungbiu, Buleleng, ini. **nat**

hal 1



Sambutan

Mandia mengatakan kasus dana desa yang tidak berani dicairkan oleh kades terjadi di Klungkung, yang rata-rata mereka mengelola dana desa Rp 2 miliar. "Indikasi paranoid kades dan perangkat desa ini bisa membuat program di desa tidak jalan. Padahal anggaran sudah masuk ke rekening desa," ucap Mandia.

"Karena tak paham aturan dan mekanisme, takut salah, dan tersangkut hukum, ya dananya menjadi nganggur. Program yang mau dibuat juga mereka *nggak* paham. Karena tidak ada pendampingan maksimal dari pemer-

intah. Kami harap Pemprov Bali segera tangani ini," tambah politisi PDIP asal Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Klungkung, ini.

Mandia mengatakan dana desa yang tidak bisa dicairkan sampai Desember mendatang akan menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Serapan yang rendah ini sangat disayangkan. "Saya tidak tahu apakah cuma di Klungkung terjadi hal ini atau di seluruh Bali. Kita berharap pihak Pemprov Bali melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa turun tangan," kata Mandia.

hal 2

Edisi : Senin, 30 Nov 2015

Hal : 3



Tambahan Pejabat Terancam

Dewan Badung
Ributkan Kesenjangan
Nominal

MANGUPURA - Upaya eksekutif Badung untuk menaikkan tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan mendapat perlawanan dari dewan. Rencana kenaikan tambahan penghasilan hingga Rp 400 miliar lebih selama tahun 2016 dinilai tak masuk akal. Apalagi terkesan ada kesenjangan cukup jauh antara pejabat dan staf.

Memang terjadi ketimpangan cukup jauh. Bahkan antara kepala dinas dan pejabat eselon seperti kabag tidak sama. Rata-rata kepala dinas mendapat tambahan penghasilan Rp 20 juta. Tapi, sejumlah kepala dinas mendapat tambahan penghasilan hampir Rp 30 juta. (*Radar Bali edisi 26 November*).

Dewan menuntut eksekutif mengkaji ulang rencana tersebut. Dewan juga mengancam tidak mau menyetujui rencana kenaikan tambahan penghasilan itu jika masih dipaksakan. Tarik ulur tambahan penghasilan pegawai dan pejabat ini pun kabarnya membuat eksekutif stres. Informasi yang dirangkum koran ini, hari minggu kemarin eksekutif mengadakan rapat dan lobi-lobi membahas hal ini. Eksekutif berusaha mencari cara agar rapat paripurna yang dilakukan Senin hari ini bisa mulus. Sementara

sumber koran ini menyebut rencana tambahan penghasilan hampir pasti terkoreksi. Dewan bersikeras agar nilai dan nominal tunjangan dikaji ulang kembali.

"*Kan* belum ketuk palu, jadi semua masih mungkin (berubah, Red). Lihat saja keputusannya besok (hari ini, Red) dalam rapat paripurna," ujar Koordinator Badan Anggaran (Banggar) I Made Sunarta kemarin (29/11). Sunarta tak menampik bila anggota dewan sempat menggelar rapat usai rapat paripurna digelar, Jumat lalu.

Rapat khusus itu berkaitan dengan masalah tambahan penghasilan pegawai. Dari rapat itu, dewan setuju tambahan penghasilan masuk dalam RAPBD 2016 dengan syarat. "Dewan memberikan usulan agar tambahan penghasilan tidak menimbulkan kesenjangan. Masak antar kepala SKPD saja berbeda. Belum lagi antar pimpinan SKPD dengan pegawai biasa," ujar Wakil Ketua II DPRD Badung.

Secara terpisah Kabag Humas dan Protokol Setda Badung AA Gede Raka Yuda mengaku belum mendapatkan informasi mengenai masalah tarik ulur tambahan penghasilan pegawai. Termasuk apakah nominalnya akan terkoreksi atau tetap, pejabat asal Gianyar itu menegaskan tak tahu menahu. "*Tyang* belum dapat informasi soal itu. Tunggu besok kabarnya ya, kan besok sidangnya," ucap juru bicara pemerintah ini singkat. (*san/han*)

Edisi : Senin, 30 Nov 2015

Hal : 24



Tambahan Penghasilan Kemungkinan Terkoreksi

MANGUPURA, NusaBali

Tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemkab Badung masih menimbulkan pro dan kontra. Kalangan dewan berpandangan tambahan penghasilan yang dirancang naik di 2016 menimbulkan kesenjangan. Hingga Minggu (29/11), masih terjadi tarik ulur.

Menurut seorang sumber terpercaya, dewan sesungguhnya tidak alergi atas rancangan tambahan penghasilan pegawai baik setingkat eselon II b Golongan IV, eselon III a Golongan IV dan III, eselon III b, eselon IV a, eselon IV b, staf PNS, maupun staf non PNS. Tetapi yang jadi persoalan adalah nilai masing-masing penerima berbeda satu sama lain. Di satu sisi, dewan mengakui pemberian tambahan penghasilan disesuaikan dengan beban kerja, namun disesalkan kenapa tambahannya sangat timpang.

"Besok (hari ini) dalam rapat paripurna keputusannya," ujar sumber yang tak mau namanya disebut

di koran. Masih menurut sumber tadi, tarik ulur masalah insentif pegawai ini sempat masuk dalam rapat terbatas anggota dewan, Jumat (27/11), pascarapat paripurna DPRD Badung dengan agenda jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi.

Koordinator Badan Anggaran (Banggar) I Made Sunarta, yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung tak menampik bila anggota dewan sempat menggelar rapat usai rapat paripurna digelar, Jumat kemarin. Rapat saat itu dilaksanakan sekitar pukul 13.00 Wita. "Memang betul ada rapat anggota dewan setelah rapat paripurna," aku Sunarta.

Saat disinggung apakah rapat itu berkaitan dengan masalah tambahan penghasilan pegawai, pejabat berkacamata itu mengiyakan. "Iya," jawab Sunarta. Dewan setuju atau menolak? "Hasil keputusan rapat dewan setuju tambahan penghasilan masuk dalam RAPBD 2016. Tetapi dewan

memberikan usulan agar tambahan penghasilan tidak menimbulkan kesenjangan. Masak antarkepala SKPD saja berbeda. Belum lagi antarpimpinan SKPD dengan pegawai biasa," jelasnya. "Lagi pula itu baru rancangan," ucap Sunarta.

Apakah rancangan tambahan penghasilan akan berubah? Politisi sekaligus Bendesa Adat Abianbase, Mengwi, itu menyatakan, "Kan belum ketok palu, jadi semua masih mungkin (berubah, *Red*). Lihat saja keputusannya besok (hari ini) dalam rapat paripurna." Secara terpisah Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung AA Gede Raka Yuda, mengaku belum mendapatkan informasi mengenai masalah tarik ulur tambahan penghasilan pegawai. Termasuk apakah nominalnya akan terkoreksi atau tetap, pejabat asal Gianyar itu menegaskan tak tahu menahu. "Tiyang belum dapat informasi soal itu. Tunggu besok kabarnya ya, kan besok (hari ini) si-dangnya," ucapnya. **asa**